

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada September 2021 di Kota Parepare terjadi deflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, seluruh kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar -0,31 persen dengan IHK sebesar 106,76 dan terendah terjadi di Watampone sebesar -0,07 persen dengan IHK sebesar 105,66. Pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, seluruh kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar -0,31 persen dengan IHK sebesar 106,76 dan terendah terjadi di Watampone sebesar -0,07 persen dengan IHK sebesar 105,66. Untuk perkembangan Harga triwulan III 2021, komoditi yang mengalami kenaikan harga yaitu minyak goreng sementara komoditi lainnya mengalami penurunan harga seperti daging sapi, cabe, bawang merah dan bawang putih.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Peningkatan harga minyak goreng dipicu stok minyak goreng yang berkurang dan harga CPO yang juga mengalami kenaikan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Berkorodinasi dengan Bulog dan instansi lain untuk dapat mendorong kelancaran distribusi pasokan minyak goreng.
- Rakor TPID untukantisipasi PPKM level 4 di Jawa Bali

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemberlakuan PPKM di Jawa dan bali dapat berimbas pada meningkatnya harga bahan makanan yang dipasok dari luar Parepare. Terkait pasokan memang menjadi salah satu kekhawatiran utamanya distribusi komoditas minyak goreng yang berasal dari Jawa Timur dan Jakarta.
- Praktik penumpukan atau penimbunan juga dapat terjadi untuk memanfaatkan situasi pengetatan. Selain daripada itu, Gangguan produksi bahan makanan di Jawa dapat mendorong Sulsel untuk banyak memasok bahan makanan keluar daerah

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Keterjangkauan Harga, meliputi subsidi ongkos angkut petani, hilirisasi dan digitalisasi UMKM Pangan serta operasi pasar
- Kelancaran distribusi , dengan optimalisasi pasar induk, realisasi KAD dengan provinsi lain, serta optimalisasi pasar mitra tani bekerjasama dengan Ecommerce.